

Judul : Dukung ketahanan pangan, perkuat infrastruktur, tekan biaya logistik
Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Dukung Ketahanan Pangan

Perkuat Infrastruktur, Tekan Biaya Logistik

WAKIL Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mendesak pembangunan infrastruktur strategis diarahkan langsung untuk menopang kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, infrastruktur benar-benar memberi dampak nyata dan jadi penopang ketahanan pangan nasional.

Iwan menegaskan, peningkatan kesejahteraan petani tak bisa dilepaskan dari upaya menekan ongkos logistik serta memperbaiki sistem irigasi di seluruh daerah penghasil pangan. Sehingga, produktivitas dan daya saing nasional terus meningkat.

"Untuk mendorong kemakmuran petani, perbaiki infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya dengan menekan biaya logistik lewat peningkatan kualitas jalan di daerah sentra produksi," ujar Iwan dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Dia bilang, efisiensi biaya logistik jadi salah satu kunci menekan harga pangan di tingkat konsumen, sekaligus meningkatkan keuntungan bagi petani. Selama ini, tingginya biaya

transportasi akibat infrastruktur yang rusak kerap membuat hasil panen tidak memiliki nilai jual yang optimal.

"Petani rugi, konsumen juga dirugikan. Karena itu, peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi perhatian serius kami di DPR," tegas legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Dia menjelaskan, saat ini DPR terus mendorong percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pelaksanaannya telah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dalam dua tahun mendatang. Program itu menargetkan perbaikan lebih dari 10 ribu kilometer (km) jalan daerah.

Keberhasilan program tersebut, lanjutnya, sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Komisi V DPR terus meminta Pemda, baik provinsi, kabupaten maupun kota, untuk lebih aktif memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis agar bisa mengakses program itu.



Andi Iwan Darmawan

"Karena banyak usulan daerah yang akhirnya tertunda hanya karena syarat-syarat administratif tidak dilengkapi," terangnya.

Selain jalan, dia juga menyoroti optimalisasi sistem irigasi sebagai penopang utama produktivitas pangan nasional. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mesti bisa memaksimalkan fungsi irigasi premier, sekunder, hingga tersier.

Berdasarkan data Kementerian PU tahun 2025, sekitar 30 persen dari total 7,2 juta hektare lahan

irigasi di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kerusakan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas padi nasional hingga 1,5 juta ton per tahun. "Komisi V DPR menilai revitalisasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional jangka menengah dan panjang," tegasnya.

Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, lanjutnya, bukan sekadar proyek fisik. Di dalamnya ada instrumen sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan nasional hanya akan tercapai bila pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan kebutuhan sektor pertanian.

"Jalan yang diperbaiki harus menghubungkan area produksi dengan pasar, dan irigasi yang dibangun harus betul-betul mengairi sawah rakyat, bukan hanya kawasan industri atau perkebunan besar," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut, infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pa-

ngan nasional. Persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir.

"Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Harga di tingkat petani jatuh, tapi di pasar naik. Jadi, infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan," ujar politikus Partai NasDem itu.

Dia bilang, infrastruktur pertanian tidak hanya sebatas proyek pembangunan jalan, melainkan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Untuk itu, DPR bersama Pemerintah akan memperkuat sinergi lintas kementerian untuk memastikan konektivitas antara lahan, sentra produksi, dan pasar berjalan efektif.

"Kalau jalannya bagus, air lancar, pupuk tersedia, maka petani untung. Jika petani untung, pangan kita stabil. Jadi, membangun infrastruktur pertanian sama dengan membangun kedaulatan pangan bangsa," tandasnya. ■ PYS